

DASAR PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA



IMAM INDRATNO
INA HELENA AGUSTINA
ASTRI MUTIA EKASARI

**DASAR PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN UNTUK
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

Imam Indratno
Ina Helena Agustina
Astri Mutia Ekasari

Editor : Sugih

Desain Cover : Sugih

Penata Letak : Sena Hari

KATA PENGANTAR

Pembangunan Pembiayaan adalah usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan (*revenue*), utang (*debt*), dan kekayaan (*equity*) yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Pengertian ini memiliki implikasi bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBN/D saja, juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah bahkan asing. Pembiayaan pembangunan model ini bisa berasal dari APBN dan di luar APBN.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui APBN, presiden mengarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur dan Penyertaan Modal Negara pada BUMN. Di luar APBN presiden mewacanakan, pertama skema *refinancing* berupa pengalihan portofolio piutang yang proyek fisiknya telah selesai kepada debitur baru. Selain itu, pembiayaan pembangunan bentuk lain yang dapat dikembangkan pemerintah adalah: pembiayaan melalui *Coporate Social Responsibility* (CSR), pembiayaan *Public Private Partnership* (PPP), *Availibility Payment*, Kawasan Ekonomi Khusus, *Debt Nature Swap* (DNS)

Buku ini hadir untuk melengkapi literatur-literatur tentang pembiayaan pembangunan khususnya untuk perencanaan wilayah dan kota. Secara garis besar, yang menjadi pokok bahasan dalam buku ini antara lain terbagi menjadi 4 (empat) bagian yang menjelaskan dasar-dasar pembiayaan pembangunan dalam perencanaan wilayah dan kota. **Bagian Pertama** dari buku ini menjelaskan mengenai Proses Penganggaran. Dalam proses penyusunan anggaran, program-program diterjemahkan sesuai dengan tanggung jawab tiap manajer pusat pertanggungjawaban sebagai pelaksanaan program atau bagian dari program. Penyusunan anggaran adalah proses penentuan peran setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian program. Di sisi lain, penganggaran diartikan sebagai bagian dari proses manajemen strategis, dengan demikian penentuan program dan aktivitas tidak berdiri sendiri. Begitupula dalam proses penganggaran keuangan negara, fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam

siklus pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua dari buku ini berisi mengenai Sumber Pembiayaan Konvensional. Sumber Pembiayaan Konvensional adalah bersumber dari pendapatan sebuah negara atau daerah. Oleh karena itu, pada bagian kedua ini membahas mengenai beberapa sumber-sumber utama dalam pembiayaan pembangunan, seperti pajak, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana kontinjensi, dana otonomi khusus, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan pinjaman dan hibah luar negeri. Pembahasan tersebut termuat dalam bab-bab dalam bagian 2 (dua) ini.

Bagian Ketiga dari buku ini menjelaskan mengenai Sumber Pembiayaan Non Konvensional. Sumber Pembiayaan Non-Konvensional berasal dari kerjasama pihak pemerintah dengan stakeholder lain yang terkait baik swasta maupun masyarakat. Dalam buku ini membahas sumber-sumber non-konvensional diantaranya adalah obligasi, pembiayaan melalui dana CSR, pembiayaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan model pembiayaan keuangan syariah.

Bagian Keempat dari buku ini membahas mengenai Pembiayaan Pembangunan Desa. Pendapatan desa untuk pembangunan diantaranya berasal dari pendapatan asli desa, transfer desa, dan kelompok pendapatan lain-lain. Dalam bagian keempat ini berfokus pada sumber pembiayaan pembangunan desa melalui transfer, yaitu alokasi dana desa (ADD). ADD adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.

Dalam penulisan buku ini telah banyak pihak-pihak yang memberikan sumbangan tenaga dan pikirannya. Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota 2015 Universitas Islam Bandung, yang telah membantu menyelesaikan buku ini. Ucapan terima

kasih juga penulis berikan kepada saudara Sugih yang telah melakukan editing dan membuat cover buku yang memuaskan. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam memahami dasar pembiayaan pembangunan untuk perencanaan wilayah dan kota. Namun penulis menyadari buku ini belum sepenuhnya sempurna. Penulis terbuka menerima kritik dan saran guna perbaikan untuk buku ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAGIAN 1 PROSES PENGANGGARAN	
BAB 1 BARANG PUBLIK DAN KEUANGAN PUBLIK	1-1
A. Pendahuluan.....	1-2
B. Dasar Hukum	1-4
C. Konsep dan Definisi	1-6
D. Pembahasan	1-13
BAB 2 PROSES PENGANGGARAN	2-1
A. Pendahuluan.....	2-2
B. Dasar Hukum	2-3
C. Konsep dan Definisi	2-5
D. Pembahasan	2-6
BAGIAN 2 SUMBER PEMBIAYAAN KONVENSIONAL	
BAB 3 PAJAK	3-1
A. Pendahuluan.....	3-2

B.	Dasar Hukum	3-3
C.	Konsep dan Definisi	3-6
D.	Pembahasan	3-13
BAB 4 DANA BAGI HASIL		4-1
A.	Pendahuluan.....	4-2
B.	Dasar Hukum	4-3
C.	Konsep dan Definisi	4-4
D.	Pembahasan	4-10
BAB 5 DANA ALOKASI UMUM		5-1
A.	Pendahuluan.....	5-2
B.	Dasar Hukum	5-3
C.	Konsep dan Definisi	5-4
D.	Pembahasan	5-6
BAB 6 DANA ALOKASI KHUSUS		6-1
A.	Pendahuluan.....	6-2
B.	Dasar Hukum	6-3
C.	Konsep dan Definisi	6-4
D.	Pembahasan	6-9
BAB 7 DANA KONTIJENSI		7-1
A.	Pendahuluan.....	7-2
B.	Dasar Hukum	7-3
C.	Konsep dan Definisi	7-3
D.	Pembahasan	7-5
BAB 8 DANA OTONOMI KHUSUS		8-1
A.	Pendahuluan.....	8-2
B.	Dasar Hukum	8-3
C.	Konsep dan Definisi	8-5

D. Pembahasan	8-6
---------------------	-----

BAB 9 DANA DEKONSENTRASI 9-1

A. Pendahuluan.....	9-2
B. Dasar Hukum	9-3
C. Konsep dan Definisi	9-5
D. Pembahasan	9-6

BAB 10 DANA TUGAS PEMBANTUAN 10-1

A. Pendahuluan.....	10-2
B. Dasar Hukum	10-4
C. Konsep dan Definisi	10-5
D. Pembahasan	10-8

BAB 11 PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI..... 11-1

A. Pendahuluan.....	11-1
B. Dasar Hukum	11-3
C. Konsep dan Definisi	11-5
D. Pembahasan	11-6

BAGIAN 3 SUMBER PEMBIAYAAN NON KONVENSIONAL

BAB 12 OBLIGASI..... 12-1

A. Pendahuluan.....	12-2
B. Dasar Hukum	12-3
C. Konsep Dasar Obligasi	12-4
D. Pembahasan	12-7

BAB 13

PEMBIAYAAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)... 13-1

A. Latar Belakang.....	13-2
B. Dasar Hukum	13-3
C. Definisi dan Konsep	13-5

D. Pembahasan	13-10
---------------------	-------

BAB 14 PEMBIAYAAN KERJASAMA PEMERINTAH

DENGAN BADAN USAHA	14-1
---------------------------------	-------------

A. Pendahuluan.....	14-2
B. Dasar Hukum	14-3
C. Konsep dan Definisi	14-4
D. Pembahasan	14-8

BAB 15 PEMBIAYAAN KEUANGAN SYARIAH

A. Pendahuluan.....	15-2
B. Dasar Hukum	15-3
C. Definisi dan Konsep	15-3
D. Pembahasan	15-4

BAGIAN 4 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

BAB 16 ALOKASI DANA DESA

A. Pendahuluan.....	16-2
B. Dasar Hukum	16-5
C. Definisi dan Konsep	16-6
D. Pembahasan	16-15

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1. Proses Pengelolaan Keuangan Publik	1-10
Gambar 1. 2. Konsep dan Alur Barang Publik	1-14
Gambar 1. 3. Pendelegasian Kewenangan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan	1-16
Gambar 1. 4. Siklus Pengelolaan Keuangan Negara	1-17
Gambar 1. 5. Proses Penyusunan Pengelolaan Keuangan Publik di Singapura	1-21
Gambar 2.1. Keterkaitan Kinerja dan Alokasi Anggaran	2-5
Gambar 2.2. Perencanaan dan Penganggaran APBN	2-7
Gambar 2.3. Tahapan Proses Penganggaran	2-9
Gambar 3.1. <i>Self Assessment System</i>	3-15
Gambar 5.1 Proses Formulasi Dana Alokasi Khusus	5-6
Gambar 8.1. Sumber Pinjaman Luar Negeri	8-7
Gambar 8.2. Mekanisme Penerusan Pinjaman Luar Negeri	8-7
Gambar 8.3. Mekanisme Pinjaman Multilateral dan Bilateral Mode 1	8-8

Gambar 8.4.	Mekanisme Pinjaman Multilateral dan Bilateral Mode 2	8-9
Gambar 8.5.	Dokumen Perencanaan Peminjaman dan Hibah Luar Negeri.....	8-9
Gambar 9.1.	Kerangka Pemikiran Dekonsentrasi	9-6
Gambar 9.2.	Prinsip Pengaturan Wewenang dan Penugasan.....	9-9
Gambar 9.3.	Bagan Alur Pertanggungjawaban Organisasi dan Dekonsentrasi	9-10
Gambar 9.4.	Bagan Arah Pertanggungjawaban dan Pelaporan	9-10
Gambar 10.1.	Pola Hubungan Penyelenggaraan Dekon/Tp Antar Instansi.....	10-6
Gambar 11.1.	Sumber Pinjaman Luar Negeri.....	11-7
Gambar 11.2.	Mekanisme Penerusan Pinjaman Luar Negeri	11-7
Gambar 11.3.	Mekanisme Pinjaman Multilateral dan Bilateral Mode 1	11-8
Gambar 11.4.	Mekanisme Pinjaman Multilateral dan Bilateral Mode 2	11-9
Gambar 11.5.	Dokumen Perencanaan Peminjaman dan Hibah Luar Negeri.....	11-9
Gambar 12.1.	Contoh Obligasi	12-9
Gambar 13.1.	<i>Triple Bottom Line</i>	13-7
Gambar 13.2.	Alur Kerjasama <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	13-9
Gambar 13.3.	Alternatif 1 Model Partisipasi Pasif.....	13-11
Gambar 13.4.	Alternatif 2 Model Partisipasi Aktif.....	13-12
Gambar 14.1.	Penyediaan Infrastruktur	14-6
Gambar 14.2.	Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.....	14-7
Gambar 14.3.	Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)	14-9
Gambar 14.4.	Proses Bisnis Pemberian <i>Project Development Facility</i> (PDF)..	14-11
Gambar 14.5.	Skema Proses Bisnis Pemberian <i>Project Development Facility</i> (PDF).....	14-11
Gambar 14.6.	Skema Persetujuan Prinsip Dukungan Kelayakan	14-13

Gambar 14.7.	Skema Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan.....	14-13
Gambar 14.8.	Skema Persetujuan Final Dukungan Kelayakan	14-14
Gambar 14.9.	Skema Surat Dukungan Kelayakan.....	14-14
Gambar 14.10.	Skema Proses Pencairan.....	14-15
Gambar 14.11.	Skema Pembagian Peran Pemerintah dan Badan Usaha dalam Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	14-16
Gambar 16.1.	Alur Penganggaran Dana Desa	16-10
Gambar 16.2.	Skema Pengalokasian Dana Desa	16-15
Gambar 16.3.	Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	16-18



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1.	Perhitungan Pajak Tahun 2016	3-17
Tabel 4.1.	Proporsi Dana Bagi Hasil untuk Masing-masing Jenis Pendapatan	4-10
Tabel 14.1.	Perbedaan Pengadaan Infrastruktur Skema Tradisional dan KPBU	14-7
Tabel 14.2.	Pembiayaan dalam Proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan.....	14-16
Tabel 16.1.	Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tambusai Utara	16-21

BAGIAN 1



PROSES PENGANGGARAN

Barang Publik dan Keuangan Publik
Proses Penganggaran



BAB 1

BARANG PUBLIK DAN KEUANGAN PUBLIK

A. Pendahuluan

a. Fenomena Pengelolaan Keuangan

Aktivitas pemerintah dapat mempunyai eksternalitas yang penting. Seluruh warga negara akan merasakan manfaat atas berbagai barang yang dibeli oleh pemerintah. Contohnya, penyediaan pertahanan umum. Seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari hal itu, apakah mereka membayar pajak atau tidak. Pemerintah menetapkan sesuatu seperti undang-undang hak milik dan hukum kontrak yang menciptakan lingkungan hukum dimana transaksi ekonomi terjadi. Keuntungan yang timbul dari lingkungan ini dinikmati oleh seluruh masyarakat.¹

Pengelolaan keuangan negara mengikuti ketentuan dalam paket undang-undang di Bidang Keuangan Negara. Siklus pengelolaan keuangan negara tidak terlepas dengan fungsi-fungsi manajemen yang dikenal selama ini. Dalam suatu organisasi, pada dasarnya manajemen dapat diartikan suatu proses yang melibatkan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Begitupula dalam pengelolaan keuangan negara, fungsi manajemen tersebut diwujudkan dalam siklus pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran/perbendaharaan, akuntansi, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban.²

¹ Rekaokta Simbolon. 2015. *Barang Publik dan Barang Privat*.

² Dr. H Aan Jaelani, M.Ag. 2005. *Pengelolaan Keuangan Publik Indonesia*.